

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap instansi tentu menghasilkan pengetahuan dan juga budaya kerja. Sumber pengetahuan ini umumnya diperoleh melalui bahan pustaka baik itu memanfaatkan media cetak berupa jurnal, buku, peta, ensiklopedia, kamus, prosiding maupun menggunakan media digital. Biasanya setiap instansi menyediakan ruangan khusus yang berfungsi sebagai sarana pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan pendistribusian informasi atau yang lebih familiar dengan istilah “Perpustakaan”. Perpustakaan adalah institusi yang mengelola karya tulis, karya cetak, karya rekam secara profesional untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi serta sarana rekreasi bagi pemustaka (Undang-undang Nomor 43 Tahun, 2007)

Perpustakaan menjadi salah satu ruangan khusus yang nyaman dan dapat dijadikan salah satu sarana untuk memuaskan hasrat memperkaya pengetahuan dengan cara membaca. Budaya membaca ini sejalan dengan wahyu yang pertama kali diturunkan yang berbunyi *iqro* yang artinya ‘bacalah’. Sebagaimana wahyu yang Allah SWT turunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW berupa surah Al-‘Alaq ayat 1 yang berbunyi:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.” (QS. Al-‘Alaq: 1)

Berdasarkan wahyu pertama kali yang diterima oleh Rasulullah yang kemudian menjadi acuan untuk menulis Al-Quran hingga sampai akhirnya mushaf Al-Quran dibukukan dan melahirkan generasi emas islam, tepatnya pada zaman khalifah Abbasiyah al-Ma’mun tahun 815 M. Pada masa Abbasiyah inilah terdapat perpustakaan bernama *Baitul Hikmah* yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah inilah yang menjadi cikal bakal dari kemajauan perpustakaan di era modern.

Diharapkan dengan didirikannya perpustakaan archivelago dapat

mendukung budaya membaca agar tercapainya salah satu cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tertuang pada Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Perpustakaan Archivelago milik Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan perpustakaan khusus yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan PERMEN KP nomor 41 tahun 2019, Perpustakaan Archivelago mengemban tugas sebagai Perpustakaan Khusus yang membina 57 unit perpustakaan yang tersebar di seluruh Indonesia terkait bidang kelautan dan perikanan yang berada di bawah Unit Kerja Eselon 1 di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perpustakaan Archivelago sendiri menghasilkan sangat banyak *local content* dibidang kelautan dan perikanan.

Perpustakaan Nasional memiliki Undang-undang No.13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang kemudian menjadi rujukan dari dibuatnya PERMEN KP nomor 41 tahun 2019 ini. Dalam UUSSKCKR dikatakan bahwa “Setiap Penerbit (termasuk penerbit kementerian dan lembaga) wajib menyerahkan 2 eksemplar dari setiap judul Karya Cetak pada Perpustakaan Nasional dan 1 eksemplar kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili Penerbit”. Hal ini menjadi wajib karena Perpustakaan Nasional memiliki fungsi deposit.

Alasan Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat PERMEN KP nomor 41 tahun 2019 ini dikarenakan Kementerian Kelautan dan Perikanan merasa bahwa Perpustakaan Archivelago sebagai perpustakaan khusus rujukan terkait subjek kelautan dan perikanan. Oleh karena itu perlu dibuat pedoman tertulis untuk menghimpun seluruh karya cetak maupun karya rekam atau yang lebih dikenal dengan *local content* KKP. Pada tahun 2019 saat PERMEN KP nomor 41 tahun 2019 ini dibuat, Perpustakaan Archivelago memiliki *local content* sebanyak 894 eksemplar dengan 601 judul yang berasal dari Unit Kerja Eselon 1.

Local content atau yang lebih dikenal dengan koleksi lokal. Menurut Damayanti (2018) *Local content* Perpustakaan KKP juga menjadi *branding* dari institusi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan melimpahnya *local*

content yang dihasilkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi pemustaka, khususnya bagi masyarakat yang berkecimpung di bidang kelautan dan perikanan.

Hal lain yang menjadi perhatian yang sangat penting dalam implementasi PERMEN KP nomor 41 tahun 2019 terhadap pengelolaan *local content* dikarenakan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 7 unit kerja yang mana masing-masing unit kerja memiliki informasi yang berbeda-beda sesuai dengan tugas unit kerja tersebut. Dengan *local content* KKP diharapkan Perpustakaan Archivelago dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna, khususnya bagi para pelaku di bidang kelautan dan perikanan. Namun semua ini masih terkendala dengan adanya indikasi sulitnya untuk menghimpun koleksi *local content* dari 8 unit kerja lingkup Eselon 1. Tidak hanya sampai proses penghimpunan saja, Perpustakaan Archivelago juga masih terkendala dengan teknis penyerahan serta pengelolaan koleksi *local content* tersebut. Khususnya *local content* yang berbentuk digital atau *soft copy*.

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi di lapangan, permasalahan yang sering muncul di Perpustakaan Archivelago adalah: (1) *local content* yang dimiliki oleh Perpustakaan Archivelago belum maksimal dalam hal penyerahan, (2) kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Perpustakaan Archivelago kepada unit kerja yang belum menyerahkan publikasinya, (3) kurangnya sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan yang menyebabkan implementasi serah simpan *local content* menjadi belum optimal terutama dalam pelaksanaan kegiatan registrasi ISBN dan ISSN. Berdasarkan paparan permasalahan di atas hal ini menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi PERMEN KP Nomor 41 Tahun 2019 Di Perpustakaan Khusus : Studi Kasus Serah Simpan *Local Content* di Perpustakaan Archivelago”**

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi PERMEN KP nomor 41 tahun 2019 terhadap serah simpan karya cetak dan karya rekam KCKR local content di Perpustakaan Archivelago.
2. Bagaimana proses dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan serah simpan KCKR local content KKP di Perpustakaan Archivelago.
3. Bagaimana tinjauan Islam terhadap Implementasi PERMEN KP Nomor 41 Tahun 2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi serah simpan KCKR *local content* yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Archivelago berdasarkan PERMEN KP nomor 41 tahun 2019.
2. Untuk mengetahui proses dan kendala yang dihadapi dalam implementasi PERMEN KP nomor 41 tahun 2019 terkait serah simpan KCKR *local content* KKP di Perpustakaan Archivelago.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa di masa akan mendatang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi saran, masukan dan solusi yang membangun bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama Perpustakaan Archivelago dalam hal serah simpan *local content* KCKR implementasi PERMEN KP nomor 41 tahun 2019.

1.6 Batasan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin memberi batasan permasalahan yaitu penelitian ini hanya membahas tentang implementasi PERMEN KP nomor 41 tahun 2019 terhadap serah simpan *local content* di Perpustakaan Archivelago.